



KURIKULUM PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

2023

KURIKULUM PELATIHAN PENYUSUNAN RPKB

Pengarah

Penulis

Editor

Ilustrasi & Layout

Diterbitkan oleh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Jakarta, Tahun 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit dengan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) BNPB dengan ini mempersembahkan Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB. Bagi Pusdiklat PB BNPB, Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini sangatlah vital, karena buku ini akan menjadi acuan seluruh pelatihan penyusunan RPKB baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. RPKB sendiri adalah salah satu dokumen perencanaan kesiapsiagaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Secara substantif RPKB merupakan kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif. Begitu pentingnya penyusunan RPKB baik dari sisi yuridis maupun substantif, sehingga Pusdiklat PB BNPB memandang pelatihan penyusunan RPKB harus menjadi prioritas untuk diselenggarakan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam konteks pelatihan tersebut, salah satu komponen utama yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah kurikulum pelatihan penyusunan RPKB. Berangkat dari kurikulum inilah kita bisa menyusun modul pelatihan, modul pelatihan fasilitator, pedoman penyelenggaraan dan panduan lainnya. Dalam konteks inilah, penyusunan Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini menjadi langkah awal bagi Pusdiklat PB BNPB untuk dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang lebih sistematis, terencana, terukur dan terprogram dengan baik.

Penyusunan Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini tidak lepas dari tugas fungsi Pusdiklat PB BNPB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan tersebut dikatakan bahwa Pusdiklat PB BNPB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana.



Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut, Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB merupakan fondasi yang akan sangat menentukan corak pelatihan itu sendiri. Menurut ketentuan umum Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atas dasar pemikiran inilah Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini disusun. Secara garis besar, penyusunan kurikulum ini mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan secara substansi mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dikeluarkan oleh BNPB tahun 2019.

Dengan selesainya penyusunan Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Letjen TNI Suharyanto, S.Sos selaku Kepala BNPB atas segala arahan dan bimbingannya selama proses pengerjaan buku ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada World Bank melalui program IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Pproject) yang melalui alokasi pendanaannya memungkinkan pekerjaan ini dapat terlaksana. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak di lingkup Pusdiklat PB BNPB dan tim konsultan individu, atas kerjasama dan koordinasi yang baik serta kontribusi yang besar bagi tersusunnya kurikulum ini. Semoga Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini dapat bermanfaat, bisa memberi dampak terhadap peningkatan kompetensi pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana..

Jakarta, 21 Desember 2023

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Kheriawan,S.Pd.I.,M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	9
B. Dasar Hukum	10
C. Tujuan Pembelajaran	11
D. Sasaran Pelatihan	13
BAB II. KURIKULUM	14
A. Struktur Kurikulum.....	15
B. Materi Pelatihan dan Jumlah Jam Pembelajaran.....	15
C. Ringkasan Materi	16
D. Metode Belajar.....	34
BAB III. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	35
A. Ruang Lingkup	36
B. Perencanaan.....	36
C. Pelaksanaan	39
D. Pengawasan dan Pengendalian.....	41
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN 1: RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP)	45
LAMPIRAN 2: RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN	53
LAMPIRAN 2.1 : MATA PELATIHAN DINAMIKA KELOMPOK.....	54
LAMPIRAN 2.2 : MATA PELATIHAN PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB	56
LAMPIRAN 2.3 : MATA PELATIHAN PROFIL WILAYAH	60
LAMPIRAN 2.4 : MATA PELATIHAN PENILAIAN/BAHAYA DAN RISIKO BENCANA	64
LAMPIRAN 2.5 : MATA PELATIHAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	66

LAMPIRAN 2.6: MATA PELATIHAN PERENCANAAN OPERASIONAL	68
LAMPIRAN 2.7: MATA PELATIHAN PERENCANAAN LOGISTIK	71
LAMPIRAN 2.8: MATA PELATIHAN TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB	73
LAMPIRAN 2.9: MATA PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI	76
LAMPIRAN 2.10: MATA PELATIHAN KETRAMPILAN MENYUSUN DAN MEMAPARKAN DRAFT DOKUMEN RPKB	78
DAFTAR ISTILAH.....	81
DAFTAR SINGKATAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Umum dan Pembelajaran Khusus	11
Table 2. Materi Pelatihan dan Estimasi Jumlah Jam Pembelajaran	15
Table 3. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Dinamika Kelompok.....	18
Table 4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Dinamika Kelompok.....	19
Table 5. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Pengantar, Arah dan Kebijakan, serta Konsep RPKB.....	20
Table 6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Pengantar, Arah dan Kebijakan, serta Konsep RPKB	20
Table 7. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Profil Wilayah	22
Table 8. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Profil Wilayah	22
Table 9. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	24
Table 10. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	24
Table 11. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Penetapan Kebijakan dan Strategi	25
Table 12. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Penetapan Kebijakan dan Strategi	26
Table 13. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Perencanaan Operasional	27
Table 14. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Perencanaan Operasional	27
Table 15. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Perencanaan Logistik.....	28
Table 16. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Perencanaan Logistik.....	29
Table 17. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB	30
Table 18. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB	30
Table 19. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Monitoring dan Evaluasi.....	31
Table 20. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Monitoring dan Evaluasi.....	31
Table 21. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Menyimulasikan dan Memaparkan Dokumen RPKB.....	32
Table 22. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Menyimulasikan dan Memaparkan Dokumen RPKB.....	33
Table 23. Metode dan Media Pembelajaran.....	34



PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya membangun ketangguhan terhadap bencana, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamatkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, memenuhi prinsip-prinsip koordinasi serta keterpaduan, kemitraan yang bertujuan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh serta menghargai budaya lokal. Diamatkan juga bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi pendidikan dan pelatihan. Untuk itu perlu disiapkan seperangkat materi yang menjadi panduan bagi para personil penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah yang dibuat dalam bentuk kurikulum dan modul yang dapat diajarkan secara luas dan berjenjang, sehingga arah dan pedoman dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana menjadi lebih jelas.

Peraturan perundang-undangan juga telah mengidentifikasi sejumlah perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana, yang secara keseluruhan berawal dari hasil identifikasi risiko bencana melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan ditindaklanjuti dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB ini secara umum memuat perencanaan penanggulangan bencana secara strategis, yang meliputi tahap pra-bencana, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, selanjutnya diturunkan ke masing-masing tahap sesuai lingkungannya seperti Rencana Aksi (Renaksi) untuk tahap pra-bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) untuk tahap penanganan darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahap pasca bencana.

Dalam hal ini khusus RPKB sebagai salah satu bentuk turunan dari RPB agar lebih operasional, perlu diturunkan ke dalam perencanaan yang lebih spesifik dalam rangka membuat rencana tindakan penanganan darurat lebih efektif. Ketika ancaman bencana semakin nyata atau akan terjadi, maka dibutuhkan Rencana Kontingensi (RenKon), yang menjabarkan dan mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan untuk ancaman bencana tunggal (*single hazard*) atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan. Selanjutnya RenKon akan diturunkan semakin lebih operasional dalam bentuk Rencana Operasi Darurat (RenOp) ketika bencana benar-benar telah terjadi.

Inisiatif Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) untuk menyusun Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB menjadi penting guna mendukung tujuan besarnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di masa depan, yang didalamnya terdapat beberapa komponen peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami dapat dilaksanakan secara baik, efisien, dan efektif. Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini berguna untuk memberikan arah yang tepat dalam kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan berjalan dengan baik sesuai ketentuan di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan prinsip pengembangan dokumen pelatihan, yaitu relevansi, efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Operasi Militer Selain Perang
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi Dan Tsunami.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Pra-bencana dan Pasca Bencana;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2009, tentang Manajemen Penanggulangan Bencana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran umum dan pembelajaran khusus untuk masing-masing mata pelatihan Penyusunan RPKB adalah sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Umum dan Pembelajaran Khusus

NO.	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
1.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun Komitmen Belajar selama proses pelatihan	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: a. Membangun harapan dan strategi mencapai harapan b. Membangun norma dan nilai dalam kelas
2.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Pengantar RPKB b. Arah dan kebijakan RPKB c. Konsep RPKB d. Pembiayaan penyusunan RPKB e. Ringkasan muatan/format RPKB

NO.	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
3.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis Profil wilayah	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis: a. Kondisi Geografis b. Kondisi Demografis c. Kondisi Ekonomi, sosial, dan budaya d. Kondisi Pertahanan dan keamanan e. Skenario Kejadian dan asumsi dampak
4.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis: a. Risiko bencana b. Prioritas penanganan kedaruratan bencana
5.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan kebijakan dan strategi	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan: a. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
6.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan perencanaan operasional	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan: a. Konsep operasi b. Proyeksi sumber daya c. Instruksi koordinasi
7.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Perencanaan logistik	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Rencana dukungan anggaran b. Rencana dukungan perbekalan & alat dan peralatan
8.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menentukan Tindak Lanjut setelah Penyusunan RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menentukan: a. Penguatan Jejaring b. Peningkatan kapasitas

NO.	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
9.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Definisi Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB b. Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB
10.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyimulasikan dokumen RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: a. menyimulasikan Dokumen RPKB b. memaparkan Dokumen RPKB hasil pelatihan

Sumber: Hasil analisis 2023

D. SASARAN PELATIHAN

Perancangan program pelatihan ini mengambil sasaran para peserta pelatihan penyusunan RPKB



KURIKULUM

2

D. STRUKTUR KURIKULUM

Pelatihan Penyusunan RPKB di desain secara sistematis untuk memberikan acuan bagi para peserta pelatihan penyusunan RPKB agar mampu mengajar sehingga peserta mampu meningkatkan kualitas kompetensinya dalam menyusun RPKB untuk kabupaten/kota tertentu.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka struktur Pelatihan Penyusunan RPKB terbagi menjadi 10 (sepuluh) mata pelatihan yaitu: 1) Dinamika kelompok; 2) Pengantar, Arah dan Kebijakan serta konsep RPKB; 3) Profil wilayah; 4) Penilaian/Bahaya, Risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana; 5) Penetapan kebijakan dan strategi; 6) Perencanaan operasional; 7) perencanaan logistik; 8) Tindak lanjut setelah penyusunan RPKB; 9) Monitoring dan evaluasi; dan 10) Ketrampilan menyimulasikan Dokumen RPKB.

E. MATERI PELATIHAN DAN JUMLAH JAM PEMBELAJARAN

Materi pelatihan serta estimasi jumlah jam pembelajaran untuk masing-masing mata pelatihan yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan Penyusunan RPKB adalah sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Table 2. Materi Pelatihan dan Estimasi Jumlah Jam Pembelajaran

NO.	MATA PELATIHAN	JPL
1.	Dinamika Kelompok a. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan b. Norma dan Nilai Dalam Kelas	3

NO.	MATA PELATIHAN	JPL
2.	Pengantar, Arah dan Kebijakan Serta Konsep RPKB a. Pengantar RPKB b. Arah dan Kebijakan RPKB c. Konsep RPKB d. Pembiayaan e. Ringkasan muatan/format RPKB	6
3.	Profil Wilayah a. Kondisi Geografis b. Kondisi Demografis c. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya d. Kondisi Kesehatan e. Kondisi Pertahanan dan Keamanan f. Skenario kejadian dan asumsi dampak	4
4.	Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana a. Risiko Bencana b. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	4
5.	Penetapan Kebijakan dan Strategi a. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana	3
6.	Perencanaan Operasional a. Konsep Operasi b. Proyeksi Sumber daya c. Instruksi Koordinasi	3
7.	Perencanaan Logistik a. Rencana dukungan anggaran b. Rencana Dukungan Perbekalan, Alat dan peralatan	3

NO.	MATA PELATIHAN	JPL
8.	Tindak Lanjut setelah Penyusunan RPKB a. Penguatan jejaring b. Peningkatan kapasitas	3
9.	Monitoring dan Evaluasi a. Definisi monitoring dan evaluasi b. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi	2
10.	Keterampilan menyimulasikan Dokumen RPKB a. Penugasan b. Simulasi penyusunan dokumen RPKB c. Pemaparan dokumen RPKB hasil pelatihan	12
TOTAL ESTIMASI JUMLAH JAM PEMBELAJARAN		43

Sumber: Hasil Analisis 2023

F. RINGKASAN MATERI

1. MATA PELATIHAN DINAMIKA KELOMPOK (3 JP @ 45 MENIT)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Materi Pelatihan ini membekali peserta berinteraksi dengan bagi dan mengenail potensi diri. Membangun Komitmen Belajar adalah materi yang penting dan mendasar dalam membentuk komitmen proses pembelajaran pada sesi berikutnya, dapat di katakan bahwa proses pembelajaran. Meskipun materi tersebut bukan materi inti, namun sangat penting dalam mengikuti pembelajaran dengan tertib dan serius. Komitmen dibentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama dari peserta dan diharapkan para peserta mentaati kesepakatan tersebut. Dalam materi membangun komitmen belajar diharapkan para peserta lebih mengenal satu sama lain serta tidak ada kecanggungan satu sama lain dalam pembelajaran sehingga potensi yang ada pada setiap peserta bisa dilihat.

Table 3. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Dinamika Kelompok

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membangun komitmen belajar dalam pembelajaran orang dewasa	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Membangun harapan dan strategi mencapai harapan 2) Membangun norma dan nilai dalam kelas

Table 4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Dinamika Kelompok

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. HARAPAN DAN STRATEGI MENCAPAI HARAPAN	a) Mengenal orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan b) Menyepakati komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran c) Harapan dan tujuan dalam pelatihan
2. NORMA DAN NILAI DALAM KELAS	a) Makna nilai bagi peserta b) Pentingnya norma c) Beberapa bentuk norma

2. MATA PELATIHAN PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB (6 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dalam konteks latar belakang, arah dan kebijakan. RPKB menjadi rujukan dan komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui ketersediaan dokumen RPKB dan implementasinya diharapkan berkontribusi pada penurunan risiko bencana di setiap daerah. Daerah akan memiliki kebijakan kerangka penanganan darurat bencana berdasarkan ancaman yang telah teridentifikasi dengan merumuskan pengorganisasian, tugas, fungsi antar organisasi pemerintahan dan pemangku kepentingan. Saat bencana terjadi, masing-masing pihak diharapkan sudah mengetahui kerangka penanggulangan kedaruratan di tingkat pemerintahan, peran masing-masing dan tindakan apa yang harus diambil.

Table 5. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Pengantar, Arah dan Kebijakan, serta Konsep RPKB

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB	<p>Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran dan istilah RPKB; 2) Menjelaskan arah dan kebijakan RPKB; 3) Menjelaskan konsep RPKB 4) Menjelaskan pembiayaan RPKB 5) Menjelaskan ringkasan muatan/format RPKB

Table 6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Pengantar, Arah dan Kebijakan, serta Konsep RPKB

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. PENGANTAR RPKB	<ol style="list-style-type: none"> a) Latar Belakang b) Dasar Hukum c) Maksud dan tujuan d) Ruang lingkup e) Sasaran f) Istilah dan definisi
2. ARAH DAN KEBIJAKAN RPKB	<ol style="list-style-type: none"> a) Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan b) Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
	c) Hubungan RPKB: dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota d) Peraturan lain yang terkait
3. KONSEP RPKB	a) Fungsi RPKB b) Tujuan RPKB c) Prinsip/dasar RPKB d) Tahapan penyusunan RPKB
4. PEMBIAYAAN	a) Jenis sumber dana b) Mekanisme pembiayaan
5. RINGKASAN MUATAN/FORMAT RPKB	a) Garis besar isi dokumen RPKB b) Uraian isi dokumen RPKB

6. MATA PELATIHAN PROFIL WILAYAH (4 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mampu menjelaskan situasi kebencanaan di wilayahnya saat ini sebagai dasar untuk menganalisis risiko bencana. Selain itu peserta dapat menjelaskan tata cara analisis risiko bencana sehingga dapat merumuskan prioritas penanganan kedaruratan. Dengan rumusan prioritas penanganan ini maka peserta dapat Menyusun Skenario kejadian dan asumsi dampak.

Table 7. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Profil Wilayah

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis profil wilayah	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menganalisis kondisi geografis 2) Menganalisis kondisi demografis 3) Menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan budaya 4) Menganalisis kondisi kesehatan 5) Menganalisis kondisi pertahanan dan keamanan 6) Menganalisis skenario kejadian dan asumsi dampak

Table 8. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Profil Wilayah

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. KONDISI GEOGRAFIS	<ol style="list-style-type: none"> a) Letak/lokasi geografis b) Luas wilayah c) Posisi Koordinat
2. KONDISI DEMOGRAFIS	<ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah dan perkembangan penduduk b) Persebaran, kepadatan dan kualitas c) Mobilitas penduduk
3. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	<ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan- kegiatan ekonomi b) Sistem nilai dan kepercayaan c) Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
	d) Peran gender dan struktur keluarga
4. KONDISI KESEHATAN	a) Kondisi sarana dan prasarana kesehatan b) Kondisi SDM Bidang Kesehatan
5. KONDISI PERTAHANAN DAN KEAMANAN	a) Kondisi Sarana Dan Prasarana Pertahanan dan Keamanan b) Kondisi SDM Pertahanan dan Keamanan
6. SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK	a) Skenario Kejadian b) Asumsi Dampak

7. MATA PELATIHAN PENILAIAN/BAHAYA, RISIKO BENCANA DAN PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA (4 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mampu menjelaskan peluang terjadinya) ancaman, kerentanan, keterpaparan, dan kapasitas. Bagian ini pada dasarnya berisi rangkuman umum dari hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya. Pengkajian risiko bencana diperlukan untuk menggambarkan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana yang mungkin timbul di suatu daerah. Hal itu bermanfaat untuk pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan strategi, serta perencanaan operasional yang harus dilakukan dalam penanganan darurat bencana.

Table 9. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Menganalisis risiko bencana 2) Menganalisis Prioritas penanganan kedaruratan bencana

Table 10. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. RISIKO BENCANA	a) Potensi bahaya b) Kerentanan c) Kapasitas d) Kajian Risiko
2. PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA	a) Matrik bencana prioritas b) Gambaran bencana prioritas

8. MATA PELATIHAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata Pelatihan ini membekali peserta tentang kebijakan dan strategi apa yang ditetapkan untuk penanggulangan kedaruratannya. Rumusan Kebijakan setidaknya menjabarkan tentang bagaimana pernyataan umum pemerintah daerah dalam menghadapi keadaan darurat bencana, kapan status kedaruratan bencana ditetapkan, penunjukan komandan penanganan darurat, pengaktifan Organisasi Komando dan Pos Komando, mobilisasi pengerahan dan pergerakan sumberdaya, antisipasi peningkatan ataupun penurunan eskalasi bencana, serta kemungkinan dampak penanganan darurat bencana terhadap kebutuhan sumberdaya yang terletak diluar wilayah administrasi pemerintahan yang terdampak.

Table 11. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Penetapan Kebijakan dan Strategi

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan kebijakan dan strategi	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Menjabarkan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 2) Menjabarkan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Table 12. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Penetapan Kebijakan dan Strategi

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. KEBIJAKAN	a) Definisi Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b) Rumusan Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
2. STRATEGI	a) Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana b) Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

9. MATA PELATIHAN PERENCANAAN OPERASIONAL (3 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan merancang ruang lingkup operasi pada status keadaan darurat. Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tindakan ini fokus pada fase (tahapan) keadaan darurat. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada saat keadaan darurat bencana terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada status keadaan darurat inilah yang merupakan dasar bagi penyusunan fungsi organisasi penanganan darurat bencana. Organisasi penanganan darurat bencana harus dapat menjalankan fungsinya melakukan seluruh tindakan terkait penanganan darurat bencana.

Table 13. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Perencanaan Operasional

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan perencanaan operasional	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Menjabarkan konsep operasi 2) Menjabarkan proyeksi sumber daya 3) Menjabarkan instruksi koordinasi

Table 14. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Perencanaan Operasional

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. KONSEP OPERASI	a) Penjabaran umum tahapan (fase) keadaan darurat b) Konsep operasi dan sasaran tindakan c) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) d) Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana
2. PROYEKSI SUMBER DAYA	a) Kerangka penggunaan sumber daya b) Tabel sumber daya (Peta Relasi Institusi)
3. INSTRUKSI KOORDINASI	a) Definisi b) Jenis instruksi koordinasi

10. MATA PELATIHAN PERENCANAAN LOGISTIK (3 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan merancang ruang lingkup operasi pada status keadaan darurat. Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tindakan ini fokus pada fase (tahapan) keadaan darurat. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada saat keadaan darurat bencana terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada status keadaan darurat inilah yang merupakan dasar bagi penyusunan fungsi organisasi penanganan darurat bencana. Organisasi penanganan darurat bencana harus dapat menjalankan fungsinya melakukan seluruh tindakan terkait penanganan darurat bencana.

Table 15. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Perencanaan Logistik

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perencanaan logistik	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Menjelaskan rencana dukungan anggaran 2) Menjelaskan rencana dukungan perbekalan, Alat dan peralatan

Table 16. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Perencanaan Logistik

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN	a) Jenis-jenis dukungan sumberdaya b) Mekanisme dukungan sumberdaya
2. RENCANA DUKUNGAN PERBEKALAN, ALAT DAN PERALATAN	a) Jenis – jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan b) Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan

11. MATA PELATIHAN TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB (3 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan tindak lanjut paska tersusunnya RPKB. Secara garis besar, tindak lanjut mencakup sejumlah kegiatan yaitu: Sosialisasi, Latihan dan Uji Dokumen, Tabletop Exercise (TTX), Pembekalan dan Pemahaman, Penyusunan Skenario dan Pertanyaan, Menyusun RPKB, Menjalin kesepakatan dg Instansi vertikal dan Kerjasama Daerah, Tinjau Ulang Dok RPKB, Pembaharuan Dok RPKB. Bagian dari kegiatan tindak lanjut lainnya adalah pelaporan RPKB; baik RPKB tingkat Kab/Kota, maupun RPKB tingkat Provinsi.

Table 17. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menentukan tindak lanjut setelah penyusunan RPKB	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: 1) Menentukan penguatan jejaring 2) Menentukan peningkatan kapasitas

Table 18. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. Penguatan Jejaring	a) Hubungan RPKB dengan Rencana Kontigensi b) Menyusun rencana kontigensi c) Melakukan kesepakatan dengan instansi vertical dan melakukan kerja sama daerah d) Pengamatan dinamika wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan. Sehingga menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya). e) Tinjau ulang dan pembaharuan RPKB f) Pelaporan atas upaya tindak lanjut
2. Peningkatan Kapasitas	a) Sosialisasi b) Latihan dan uji dokumen

12. MATA PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI (2 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyiapkan dokumen pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan proses yang disepakati, mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan RPKB sedini mungkin, pencapaian standar minimum layanan dan peningkatan kinerja PB, penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan penyusunan RPKB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Table 19. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Monitoring dan Evaluasi

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan monitoring evaluasi RPKB	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan definisi monitoring dan evaluasi 2) Menjelaskan Ruang lingkup monitoring dan evaluasi di tingkat BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota

Table 20. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Monitoring dan Evaluasi

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. DEFINISI MONITORING DAN EVALUASI	<ol style="list-style-type: none"> a) Definisi monitoring dan evaluasi b) Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi c) Kriteria kunci monitoring evaluasi RPKB

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
2. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI	a) Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BNPB b) Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BPBD Provinsi c) Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BPBD Kabupaten/Kota

13. MATA PELATIHAN KETRAMPILAN MENSIMULASIKAN DOKUMEN RPKB HASIL PELATIHAN (12 JP @ 45 menit)

DESKRIPSI SINGKAT MATA PELATIHAN

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan simulasi penyusunan RPKB. RPKB menurut Pedoman RPKB Edisi Tahun 2019 adalah kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

Table 21. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Mensimulasikan Dokumen RPKB

HASIL BELAJAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR
Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mensimulasikan dokumen RPKB Hasil Pelatihan.	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mensimulasikan dan memaparkan dokumen RPKB Hasil Pelatihan.

Table 22. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Mensimulasikan dan Memaparkan Dokumen RPKB

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
1. PENUGASAN	a) Penjelasan penugasan b) Sistematika Penulisan RPKB
2. SIMULASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPKB	a) Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen RPKB. b) Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen RPKB. c) Simulasi Penyusunan dokumen RPKB.
3. PEMAPARAN DOKUMEN RPKB HASIL LATIHAN	a) Penyiapan pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan b) Pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan

G. METODE BELAJAR

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Andragogi Learning (Pendidikan Orang Dewasa) dengan mensyaratkan keterlibatan aktif dari setiap peserta melalui komunikasi dua arah sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya.

Table 23. Metode dan Media Pembelajaran

METODE PEMBELAJARAN	MEDIA PEMBELAJARAN
1. Pembelajaran Mandiri (<i>Asynchronous</i>), (<i>Learning Management System</i>) maupun media (<i>e-learning</i>) lainnya Pembelajaran mandiri melalui LSM	Antara lain : Modul, Video Pembelajaran, Latihan Sosial, Studi Kasus
2. Pembelajaran Tatap Muka (<i>Synchronous</i>), Pembelajaran tatap muka dengan presentasi yang dilakukan luring (luar jaringan) secara offline dalam kelas (klasikal) maupun dilakukan secara daring (dalam jaringan/online dengan aktivitas antara lain presentasi, tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan/atau simulasi)	Antara lain : Slide bahan tayang, Proyektor, Laptop, Whiteboard, Flipchart, Aplikasi Zoom Meeting, dll



BNPB

PSD

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

3

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan pelatihan penyusunan RPKB meliputi:

1. Perencanaan pelaksanaan Pelatihan Penyusunan RPKB meliputi persiapan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga penyelenggaraan pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, surat keterangan
3. Pengawasan dan pengendalian yang meliputi laporan pelaksanaan pelatihan dan evaluasi paska Pelatihan Penyusunan RPKB.

B. PERENCANAAN

1. Persiapan Pelatihan

Persiapan Pelatihan penyusunan RPKB dilakukan melalui kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

- Perangkat Daerah (Prov/Kab/Kota) menyampaikan usulan penyelenggaraan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (PUSDIKLAT PB) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan
- Dalam perencanaan Pelatihan Penyusunan RPKB, Pengelola dan Penyelenggara PUSDIKLAT PB yang meliputi Jadwal Pembelajaran, Tenaga Pelatihan, dan Sarana dan Prasarana Pelatihan
- PUSDIKLAT PB melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Penyusunan RPKB yang telah ditetapkan sebagai peserta Pelatihan, dan
- PUSDIKLAT PB menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RPKB Perangkat Daerah (Prov/Kab/Kota) dengan melampirkan daftar peserta Pelatihan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum Pelatihan diselenggarakan.

2. Peserta

Peserta Pelatihan Penyusunan RPKB paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon 3 atau pejabat fungsional yang setara
2. Minimal berpendidikan S1 atau yang sederajat
3. Sehat jasmani dan Rohani
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
5. Mampu mengoperasikan komputer
6. Memperoleh rekomendasi dan izin dari atasan, diusulkan oleh instansi/Kementerian/Lembaga calon peserta.
7. Jika peserta tidak berada dibawah instansi (perorangan) dapat menunjukkan sertifikat bidang kebencanaan atau memiliki pengalaman dibidang penanggulangan bencana

3. Tenaga pengajar

Tenaga pengajar meliputi;

a. Narasumber/Penceramah

Narasumber/Penceramah adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pelatihan

b. Widyaiswara

Widyaiswara yang ditugaskan untuk mengampu mata pelatihan sesuai kurikulum pelatihan dan telah lulus pelatihan kewidyaiswaraan

c. Praktisi/Akademisi/Pakar

Pendidik yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan baik dari dalam atau luar instansi penyelenggara

4. Persyaratan Tenaga Pengajar

- 1) Pendidikan minimal Sarjana
- 2) Pejabat Struktural yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) TOT
- 3) Pejabat Fungsional Tertentu Analis Kebencanaan/Penata Penanggulangan Bencana Ahli yang memiliki STTPL TOT

5. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana pelatihan ini diupayakan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan hasil dari pelatihan ini.

a. Sarana

Sarana pelatihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RPKB antara lain:

- Meja;
- Kursi;
- Flip Chart;
- Sound sytem;
- Perekam;
- Komputer/Laptop
- Infokus/TV
- Jaringan Wireless Fidelity (wi-fi)
- Buku referensi;
- Digital Literasi;
- Modul/bahan ajar; dan
- Teknologi multimedia

b. Prasarana

Prasarana pelatihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RPKB antara lain

- Tempat pelatihan harus ramah disabilitas;
- Aula;
- Ruang kelas,
- Ruang diskusi;

- Ruang Makan;
- Fasilitas olahraga
- Pos kesehatan dan ruang laktasi;
- Tempat ibadah.

6. Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RPKB dibebankan pada anggaran instansi penyelenggara dan/atau instansi pengirim;
2. Indek anggaran program Pelatihan Penyusunan RPKB disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga penyelenggaraan pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, surat keterangan

1. Mekanisme Pelaksanaan

- a. Pembukaan
- b. Pelaksanaan pre test oleh team monitoring dan evaluasi
- c. Pelaksanaan pembelajaran
- d. Pelaksnaan post test dan rencana tindak lanjut oleh team monitoring dan evaluasi

2. Lembaga Penyelenggaraan

Pelatihan Penyusunan RPKB diselenggarakan oleh:

1. PUSDIKLAT PB
2. BPSDM Daerah yang terakreditasi untuk penyelenggaraan pelatihan penyusunan RPKB atau kerjasama dengan Pusdiklat PB bagi yang belum terakreditasi

3. Evaluasi

Evaluasi Pelatihan Penyusunan RPKB terdiri dari atas evaluasi terhadap peserta, tenaga pelatihan, penyelenggaraan dan pasca pelatihan.

a. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta diberikan terhadap semua materi sampai sebelum penutupan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan dan kemajuan peserta dalam proses pembelajaran

b. Evaluasi pelatih

Evaluasi pelatih/fasilitator yang dimaksud adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran setiap hari dan terhadap fasilitator/pelatih. Evaluasi tiap hari dilakukan dengan cara merefleksikan kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung sebagai umpan balik untuk penyempurnaan proses pembelajaran selanjutnya. Evaluasi terhadap fasilitator dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator telah mengakhiri materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan form evaluasi terhadap fasilitator

c. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan dari aspek administrasi dan teknis. Hasilnya digunakan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepada setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan ketentuan kehadiran minimal 95% berhak mendapatkan STTPL yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (PUSDIKLAT PB) dengan jumlah jam pembelajaran 49 JPL yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan menyusun laporan pelaksanaan pelatihan yang disampaikan kepada pimpinan lembaga. Atas persetujuan pimpinan lembaga, penyelenggara pelatihan bersurat kepada lembaga/instansi mitra kerja untuk mensosialisasikan hasil pelatihan khususnya dokumen RPKB pelatihan, agar bisa dipelajari oleh lembaga mitra. Diharapkan lembaga mitra bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun dokumen RPKB bagi daerah-daerah yang belum memiliki dokumen RPKB. Termasuk mengusulkan kepada

pemerintah daerah untuk memasukkan program penyusunan dokumen RPKB ke dalam dokumen penganggaran (DIPA) sebagai program prioritas.

Sedangkan untuk evaluasi pasca pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan pelatihan dan dilakukan oleh penyelenggara pelatihan bekerjasama dengan Tim Evaluator dan atau dengan Tim Penjamin Mutu Pelatihan.



PENUTUP **4**

Kurikulum Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini disusun untuk memenuhi sebagian amanat undang-undang yang diemban oleh Pusdiklat PB BNPB. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja BNPB, khususnya pada Pasal 282 diuraikan bahwa fungsi Pusdiklat PB BNPB antara lain penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Penyusunan NSPK ini sangat berkaitan erat dengan tugas fungsi Pusdiklat PB BNPB yang lain yaitu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, struktural, fungsional, dan teknis lainnya bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Untuk memenuhi tugas fungsi tersebut, bersama Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB ini, Pusdiklat PB juga sudah menyusun Buku Modul Pelatihan Penyusunan RPKB. Kurikulum dan Modul ini merupakan satu kesatuan acuan dan bahan pembelajaran dalam pelatihan Penyusunan RPKB. Dengan tersusunnya 2 (dua) NSPK ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan terusunnya 2 (dua) NSPK ini diharapkan bisa segera ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan fasilitasi pelatihan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

LAMPIRAN 1

RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP)

LAMPIRAN 1 RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP)

Nama Program Pelatihan	:	Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
Alokasi Waktu	:	49 JP @ 45 Menit (2.940 Menit)
Deskripsi Program	:	Pelatihan ini membekali peserta pelatihan penyusunan dokumen RPKB. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dalam pelatihan ini adalah peserta mampu menyiapkan dokumen RPKB secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktek penyiapan dokumen RPKB. Perancangan program pelatihan ini mengambil sasaran para peserta pelatihan penyusunan RPKB
Tujuan Program		Menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan dokumen RPKB
Kompetensi Dasar	:	Pada akhir pelatihan peserta diharapkan mampu mensimulasikan penyusunan dokumen RPKB secara efektif dan efisien
Indikator Keberhasilan	:	

Tabel L.1. Rancang Bangun Program Pelatihan Penyusunan RPKB

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
		Pembukaan					1 JP	
		Pre Test			G form		1 JP	
		Pengarahannya Program	Arahan pelatihan penyusunan RPKB		Presentasi		2 JP	
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: Membangun Komitmen belajar	Dinamika Kelompok	1. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan 2. Norma dan Nilai Dalam Kelas	a. Mengenal orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan b. Harapan dan tujuan dalam pelatihan a. Pengertian Umum bentuk dan Fungsi Norma b. Norma dalam Proses pembelajaran c. Membangun komitmen belajar	1. Presentasi 2. Curah pendapat 3. Permainan		3 JP	
2.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu : Menjelaskan pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB	Pengantar Arah dan Kebijakan serta konsep RPKB	1. Pengantar RPKB 2. Arah dan kebijakan RPKB	a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Maksud dan tujuan d. Ruang lingkup e. Sasaran f. Istilah dan definisi a. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4. Curah pendapat	Test non objective: Menanyakan pemahaman dari sub materi pokok	6 JP	1. Pedoman RPKB thn 2019 2. UU no 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
				<ul style="list-style-type: none"> b. Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB c. Hubungan RPKB dengan standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota d. Peraturan lain yang terkait 				3. PP no 21 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan PB
			3. Konsep RPKB	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi RPKB b. Tujuan RPKB c. Prinsip/Dasar RPKB d. Tahapan penyusunan RPKB 				
			4. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis sumber dana b. Mekanisme pembiayaan 				
			5. Ringkasan muatan RPKB	<ul style="list-style-type: none"> a. Garis besar isi dokumen RPKB b. Uraian isi dokumen RPKB 				
3.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: Menganalisis profil Wilayah	Profil wilayah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Geografis 2. Kondisi Demografis 3. Kondisi Ekonomi, sosial, dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Letak/lokasi geografis b. Luas wilayah c. Posisi koordinat a. Jumlah dan perkembangan penduduk b. Persebaran, kepadatan dan kualitas c. Mobilitas penduduk a. Kegiatan-kegiatan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok 4. Penugasan 5. Studi kasus 	Non test: Produk Profil Wilayah dan draft skenario kejadian dan asumsi dampak	4 JP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman RPKB 2019 2. RTRW Kab/Kota 3. Kab/Kota Dalam Angka

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
				b. Sistem nilai dan kepercayaan c. Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya d. Peran gender dan struktur keluarga				
			4. Kondisi Pertahanan dan keamanan	a. Komponen pertahanan dan keamanan b. Kawasan pertahanan dan keamanan				
			5. Skenario kejadian dan asumsi dampak	a. Skenario Kejadian b. Asumsi dampak				
4.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana	Penilaian/ Bahaya, Risiko Bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana	1. Risiko Bencana 2. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	a. Potensi bahaya b. Kerentanan c. Kapasitas d. Kajian risiko a. Matrik bencana prioritas b. Gambaran bencana prioritas	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Curah pendapat 5. Penugasan 6. Studi kasus (ancaman bencana prioritas)	Test non objective • Isi, Penjelasan, uraian singkat	4 JP	1. Pedoman RPKB 2019 2. Renkon Wilayah masing-masing
5.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: menjabarkan kebijakan dan strategi	Penetapan Kebijakan dan Strategi	1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. Definisi kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Rumusan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4. Curah pendapat	Test non objective: • Isi, Penjelasan, uraian singkat	3 JP	Pedoman RPKB 2019

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
			2. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana	5. Penugasan			
6.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: menjabarkan perencanaan operasional	Perencanaan Operasional	1. Konsep Operasi	a. Penjabaran umum tahapan (fase) keadaan darurat b. Konsep operasi dan sasaran tindakan c. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) d. Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4. Curah pendapat 5. Penugasan 6. Studi kasus	Test non objective 1. Narasi konsep operasi. 2. Dokumen proyeksi sumber daya 3. Rancangan dokumen koordinasi	3 JP	Pedoman RPKB 2019
			2. Proyeksi Sumber Daya	a. Kerangka Penggunaan Sumber daya b. Tabel Sumber daya (Peta Relasi Institusi)				
			3. Instruksi Koordinasi	a. Definisi b. Jenis instruksi koordinasi				
7.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: Menjelaskan	Perencanaan Logistik	1. Rencana Dukungan Anggaran	a. Jenis-jenis dukungan sumber pendanaan b. Mekanisme dukungan sumber pendanaan	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi	Test non objective: identifikasi sumberdaya daerah	3 JP	• Pedoman RPKB 2019

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
	perencanaan logistik		2. Rencana Dukungan Perbekalan, Alat dan peralatan	a. Jenis-jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan b. Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan	4. Penugasan	yang mungkin dapat digunakan		<ul style="list-style-type: none"> Perban no 4 tahun 2018 tentang Manajemen Logistik BNPB Renkon V
8.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: menentukan Tindak Lanjut Setelah penyusunan RPKB	Tindak Lanjut Setelah penyusunan RPKB	1. Penguatan jejaring	a. Hubungan RPKB dengan Rencana Kontigensi b. Menyusun rencana kontigensi c. Melakukan kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerja sama daerah d. Pengamatan dinamika wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan. Sehingga menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya). e. Tinjau ulang dan Pembaharuan dokumen RPKB	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah pendapat 4. Penugasan 5. Studi kasus	Non test Produk tindak lanjut penyusunan RPKB	3 JP	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman RPKB 2019 Perda SOTK Pemerintah Daerah dan Lembaga Vertikal di Daerah

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
				f. Pelaporan atas upaya tindak lanjut				
			2. Peningkatan Kapasitas	a. Sosialisasi b. Latihan dan uji dokumen				
9.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: menjelaskan monitoring evaluasi RPKB	Monitoring dan evaluasi	1. Definisi monitoring dan evaluasi	a. Definisi monitoring dan evaluasi b. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi RPKB c. Kriteria kunci Monitoring evaluasi RPKB	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Penugasan	Non test Penyiapan dokumen monitoring dan evaluasi	2 JP	1. Pedoman RPKB 2019 2. Dokumen bahan evaluasi upaya penanggulangan bencana secara berkala 3. IFRC monev manual 4. Referensi khusus BNPB
			2. Ruang lingkup Monitoring dan evaluasi RPKB di tingkat BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota	a. Ruang lingkup Monitoring evaluasi RPKB di tingkat BNPB b. Ruang lingkup Monitoring evaluasi RPKB di tingkat BPBD Provinsi c. Ruang lingkup Monitoring evaluasi RPKB di tingkat BPBD Kab/Kota				
10.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:	Ketrampilan mensimulasikan	1. Penugasan	a. Penjelasan penugasan b. Sistematika penulisan RPKB	Praktik/Simulasi	Non test	12 JP	Pedoman RPKB 2019

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	EVALUASI	JPL	REFERENSI
	mensimulasikan dokumen RPKB hasil pelatihan	Dokumen RPKB Hasil Pelatihan	2. Simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB	a. Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen RPKB.		Produk dokumen RPKB Hasil Pelatihan		
				b. Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen RPKB.				
			3. Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan	a. Penyiapan pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan. b. Pemaparan dokumen RPKB Hasil pelatihan	1. Presentasi 2. Tanya Jawab	3. Kemampuan pemaparan 4. Kualitas materi paparan		Dokumen RPKB hasil pelatihan
		Post test	Post test				1 JP	
		Penutupan					1 JP	
						TOTAL	49 JP	

LAMPIRAN 2

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP)

LAMPIRAN 2.1. MATA PELATIHAN DINAMIKA KELOMPOK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Materi Pelatihan : Dinamika Kelompok
3. Alokasi Waktu : 3 JP @45 menit (135 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta berinteraksi dengan berbagi dan mengenal potensi diri. Membangun komitmen belajar adalah materi yang penting dan mendasar dalam membentuk komitmen proses pembelajaran.
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membangun komitmen belajar.
: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Membangun harapan dan strategi mencapai harapan
 2. Membangun norma dan nilai dalam kelas
 - b. Indikator hasil belajar
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan
 - a. Menegal orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan
 - b. Menyepakati komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran
 - c. Harapan dan tujuan dalam pelatihan
 2. Norma dan nilai dalam kelas
 - a. Makna nilai bagi peserta
 - b. Pentingnya norma
 - c. Beberapa bentuk norma

Tabel 1.2. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Dinamika Kelompok

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat membangun harapan dan strategi mencapai harapan	1. Harapan dan strategi mencapai harapan		a. Mengenal orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan b. Menyepakati komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran c. Harapan dan tujuan dalam pelatihan	1. Ceramah interaktif 2. Presentasi 3. Permainan	1. Bahan tanyang 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. Whiteboard 6. Spidol 7. Panduan Diskusi	Test nonobjective: Isi, Penjelasan, uraian singkat	3	
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat membangun norma dan nilai dalam kelas	2. Norma dan nilai dalam kelas		a. Makna nilai bagi peserta b. Pentingnya norma c. Beberapa bentuk norma					
		Pre - Test							

Sumber: Hasil analisis 2023

LAMPIRAN 2.2.

MATA PELATIHAN PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Materi Pelatihan : Pengantar, Arah dan kebijakan serta konsep RPKB
3. Alokasi Waktu : 6 JP @45 menit (270 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dalam konteks latar belakang, arah dan kebijakan. RPKB menjadi rujukan dan komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui ketersediaan dokumen RPKB dan implementasinya diharapkan berkontribusi pada penurunan risiko bencana di setiap daerah. Daerah akan memiliki kebijakan kerangka penanganan darurat bencana berdasarkan ancaman yang telah teridentifikasi dengan merumuskan pengorganisasian, tugas, fungsi antar organisasi pemerintahan dan pemangku kepentingan. Saat bencana terjadi, masing-masing pihak diharapkan sudah mengetahui kerangka penanggulangan kedaruratan di tingkat pemerintahan, peran masing-masing dan tindakan apa yang harus diambil.
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran dan istilah RPKB
 2. Menjelaskan arah dan kebijakan RPKB
 3. Menjelaskan konsep RPKB
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Pengantar RPKB
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum

- c. Maksud dan tujuan
 - d. Ruang lingkup
 - e. Sasaran
 - f. Istilah dan definisi
2. Arah dan Kebijakan RPKB
 - a. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan
 - b. Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB
 - c. Hubungan RPKB: dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Peraturan lain yang terkait
 3. Konsep RPKB
 - a. Fungsi RPKB
 - b. Tujuan RPKB
 - c. Prinsip/dasar RPKB
 - d. Tahapan penyusunan RPKB
 4. Pembiayaan
 - a. Jenis sumber dana
 - b. Mekanisme pembiayaan
 5. Ringkasan muatan/format RPKB
 - a. Garis besar isi dokumen RPKB
 - b. Uraian isi dokumen RPKB

Tabel L.3. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Pengantar, Arah Dan Kebijakan Serta Konsep RPKB

No	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket
		Materi Pokok	Sub Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat : menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran dan istilah RPKB	1. Pengantar RPKB	a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Maksud dan tujuan d. Ruang lingkup e. Sasaran f. Istilah dan definisi	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab	1. Bahan tanyang 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. Spidol	Test non objective: Isi, Penjelasan, uraian singkat	6	1. Draft Pedoman RPKB 2. UU no 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Permendagri 100/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat : menjelaskan arah dan kebijakan RPKB	2. Arah dan kebijakan RPKB	a. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan b. Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB c. Hubungan RPKB:dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota d. Peraturan Lain yang terkait					

No	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket
		Materi Pokok	Sub Materi Pokok					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjelaskan konsep RPKB	3. Konsep RPKB	a. Fungsi RPKB b. Tujuan RPKB c. Prinsip/Dasar RPKB d. Tahapan penyusunan RPKB					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjelaskan pembiayaan RPKB	4. Pembiayaan	a. Jenis sumber dana b. Mekanisme pembiayaan					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjelaskan ringkasan muatan/format RPKB	5. Ringkasan muatan/format RPKB	a. Garis besar isi dokumen RPKB b. Uraian isi dokumen RPKB					

Sumber: Hasil analisis 2023

LAMPIRAN 2.3. MATA PELATIHAN PROFIL WILAYAH

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Mata Pelatihan : Profil Wilayah
3. Alokasi Waktu : 4 JP @45 menit (180 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mampu menjelaskan situasi kebencanaan di wilayahnya saat ini sebagai dasar untuk menganalisis risiko bencana. Selain itu peserta dapat menjelaskan tata cara analisis risiko bencana sehingga dapat merumuskan prioritas penanganan kedaruratan. Dengan rumusan prioritas penanganan ini maka peserta dapat Menyusun Skenario kejadian dan asumsi dampak.
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis profil wilayah
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menganalisis kondisi geografis
 2. Menganalisis kondisi demografis
 3. Menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan budaya
 4. Menganalisis kondisi pertahanan dan keamanan
 5. Menganalisis skenario kejadian dan asumsi dampak
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Kondisi Geografis
 - a. Letak/lokasi geografis
 - b. Luas wilayah
 - c. Posisi koordinat
 2. Kondisi Demografis:
 - a. Jumlah dan perkembangan penduduk
 - b. Persebaran, kepadatan dan kualitas

- c. Mobilitas penduduk
- 3. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya
 - a. Kegiatan – kegiatan ekonomi
 - b. Sistem nilai dan kepercayaan
 - c. Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya
 - d. Peran gender dan struktur keluarga
- 4. Kondisi pertahanan dan keamanan
 - a. Komponen pertahanan dan keamanan
 - b. Kawasan pertahanan dan keamanan
- 5. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak
 - a. Skenario Kejadian
 - b. Asumsi Dampak

Tabel L.5. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Profil Wilayah

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis kondisi geografis	1. Kondisi geografis	a. Letak/lokasi Geografis b. Luas wilayah c. Posisi koordinat	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab 3. Diskusi kelompok 4. Penugasan	1. Slide Presentasi 2. Laptop 3. LCD Projector 4. Papan flipchart 5. Kertas flipchart 6. Spidol	Test non objective: • Isi, Penjelasan, uraian singkat	4	1. UU no 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Pedoman RPKB

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis kondisi Demografis :	2. Kondisi Demografis	a. Jumlah dan perkembangan penduduk b. Persebaran, kepadatan dan kualitas c. Mobilitas penduduk					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis kondisi Ekonomi, sosial dan budaya :	3. Kondisi Ekonomi, sosial dan budaya	a. Kegiatan-kegiatan ekonomi b. Sistem nilai dan kepercayaan c. Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya d. Peran gender dan struktur keluarga					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis kondisi Pertahanan dan keamanan :	4. Kondisi Pertahanan dan keamanan	a. Komponen pertahanan dan keamanan b. Kawasan pertahanan dan keamanan					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis :	5. Skenario kejadian dan asumsi dampak	a. skenario kejadian b. Asumsi dampak					

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	skenario kejadian dan asumsi dampak							

Sumber: Hasil analisis 2023

LAMPIRAN 2.4. MATA PELATIHAN PENILAIAN/BAHAYA DAN RISIKO BENCANA

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Mata Pelatihan : Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana
3. Alokasi Waktu : 4 JP @45 menit (180 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mampu menjelaskan peluang terjadinya) ancaman, kerentanan, keterpaparan, dan kapasitas. Bagian ini pada dasarnya berisi rangkuman umum dari hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya. Pengkajian risiko bencana diperlukan untuk menggambarkan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana yang mungkin timbul di suatu daerah. Hal itu bermanfaat untuk pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan strategi, serta perencanaan operasional yang harus dilakukan dalam penanganan darurat bencana
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menganalisis risiko bencana
 2. Menganalisis Prioritas penanganan kedaruratan bencana
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Risiko Bencana
 - a. Potensi bahaya
 - b. Kerentanan
 - c. Kapasitas
 - d. Kajian Risiko

2. Prioritas penanganan kedaruratan bencana
 - a. Matrik bencana prioritas
 - b. Gambaran bencana prioritas

Tabel L.5. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana Dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis risiko bencana	1. Risiko Bencana	a. Potensi bahaya b. Kerentanan c. Kapasitas d. Kajian risiko	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab 3. Diskusi kelompok 4. Penugasan	1. Slide Presentasi 2. Laptop 3. LCD Projector 4. Papan flipchart 5. Kertas flipchart 6. Spidol	Test non objective: Isi, Penjelasan, Uraian singkat	4	1. UU no 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Pedoman RPKB
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menganalisis prioritas penanganan kedaruratan bencana	2. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	a. Matrik bencana prioritas b. Gambaran bencana prioritas					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.5. MATA PELATIHAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Mata Pelatihan : Penetapan Kebijakan dan Strategi
3. Alokasi Waktu : 3 JP @45 menit (135 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta tentang kebijakan dan strategi apa yang ditetapkan untuk penanggulangan kedaruratannya. Rumusan Kebijakan setidaknya menjabarkan tentang bagaimana pernyataan umum pemerintah daerah dalam menghadapi keadaan darurat bencana, kapan status kedaruratan bencana ditetapkan, penunjukan komandan penanganan darurat, pengaktifan Organisasi Komando dan Pos Komando, mobilisasi pengerahan dan pergerakan sumberdaya, antisipasi peningkatan ataupun penurunan eskalasi bencana, serta kemungkinan dampak penanganan darurat bencana terhadap kebutuhan sumberdaya yang terletak diluar wilayah administrasi pemerintahan yang terdampak.
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan kebijakan dan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menjabarkan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 2. Menjabarkan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - a. Definisi Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - b. Rumusan Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 2. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - c. Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - d. Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Tabel L.6. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Penetapan Kebijakan dan Strategi

No	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi
		Materi Pokok	Sub Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjabarkan kebijakan	1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. Definisi kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Rumusan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab 3. Diskusi kelompok 4. Penugasan	1. Bahan tanyang 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. Whiteboard 6. Spidol	Test non Objective: Isi, Penjelasan, Uraian singkat	3 JP	Pedoman RPKB 2019 Perka 3 tahun 2016 UU 24 tahun 2007
2	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjabarkan strategi	2. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.6. MATA PELATIHAN PERENCANAAN OPERASIONAL

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan RPKB
2. Mata Pelatihan : Perencanaan Operasional
3. Alokasi Waktu : 3 JP @45 menit (135 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan merancang ruang lingkup operasi pada status keadaan darurat. Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tindakan ini fokus pada fase (tahapan) keadaan darurat. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada saat keadaan darurat bencana terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada status keadaan darurat inilah yang merupakan dasar bagi penyusunan fungsi organisasi penanganan darurat bencana. Organisasi penanganan darurat bencana harus dapat menjalankan fungsinya melakukan seluruh tindakan terkait penanganan darurat bencana.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan perencanaan operasional
 - b. Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menjabarkan konsep operasi
 2. Menjabarkan proyeksi sumber daya
 3. Menjabarkan instruksi koordinasi
7. Materi Pokok & Sub-Materi Pokok :
 1. Konsep Operasi
 - a. Penjabaran umum tahapan (fase) keadaan darurat
 - b. Konsep operasi dan sasaran tindakan
 - c. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
 - d. Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana

2. Proyeksi Sumber daya
 - a. Kerangka penggunaan sumber daya
 - b. Tabel sumber daya (peta relasi Institusi)
3. Instruksi koordinasi
 - a. Definisi
 - b. Jenis instruksi koordinasi

Tabel L.7. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Perencanaan Operasional

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjabarkan Konsep operasi	1. Konsep operasi	a. Penjabaran umum tahapan (fase) keadaan darurat b. Konsep operasi dan sasaran tindakan c. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) d. Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanggulangan kedaruratan bencana	1. Diskusi 2. Simulasi 3. Presentasi	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. Papan Tulis 5. Kertas & Papan Flipchart 6. Spidol berbagai warna 7. Panduan simulasi 8. Panduan Diskusi	Non Test Product: 1. Narasi konsep operasi. 2. Dokumen proyeksi sumber daya 3. Rancangan dokumen koordinasi	3	Pedoman RPKB 2019
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjabarkan	2. Proyeksi sumber daya	a. Kerangka Penggunaan Sumber daya					

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ket.
(1)	(2)	Materi Pokok (3)	Sub-Materi Pokok (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	proyeksi sumber daya		b. Tabel Sumberdaya (peta relasi Institusi)					
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menjabarkan instruksi koordinasi	3. Instruksi koordinasi	a. Definisi b. Jenis instruksi koordinasi					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.7. MATA PELATIHAN PERENCANAAN LOGISTIK

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan RPKB
- 2 Mata Pelatihan : **Perencanaan Logistik**
- 3 Alokasi Waktu : 3 JP @45 menit (135 menit)
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan merancang ruang lingkup operasi pada status keadaan darurat. Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tindakan ini fokus pada fase (tahapan) keadaan darurat. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada saat keadaan darurat bencana terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada status keadaan darurat inilah yang merupakan dasar bagi penyusunan fungsi organisasi penanganan darurat bencana. Organisasi penanganan darurat bencana harus dapat menjalankan fungsinya melakukan seluruh tindakan terkait penanganan darurat bencana.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perencanaan logistik
 - b. Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
 1. Menjelaskan rencana dukungan anggaran
 2. Menjelaskan rencana dukungan perbekalan, alat dan peralatan
- 6 Materi Pokok & Sub-Materi Pokok :
 1. Rencana Dukungan Anggaran
 - a. Jenis-jenis dukungan sumber pendanaan
 - b. Mekanisme dukungan sumber pendanaan
 2. Rencana Dukungan Perbekalan, alat dan peralatan
 - a. Jenis – jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan
 - b. Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan

Tabel L.8. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Perencanaan Logistik

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Ke t.
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: menjelaskan rencana dukungan anggaran	1. Rencana Dukungan Anggaran	a. Jenis-jenis dukungan sumber pendanaan. b. Mekanisme dukungan sumber pendanaan	1. Diskusi 2. Simulasi 3. Presentasi	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. Papan Tulis 5. Kertas & Papan Flipchart 6. Spidol berbagai warna 7. Panduan simulasi 8. Panduan Diskusi	Non Test Product: 1. Rancangan dukungan anggaran 2. Rancangan dukungan perbekalan & Alpal	3	Pedoman RPKB
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: menjelaskan rencana dukungan perbekalan, alat dan peralatan	2. Rencana Dukungan Perbekalan, alat dan peralatan	a. Jenis-jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan b. Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.8.

MATA PELATIHAN TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan RPKB
2. Mata Pelatihan : **Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB**
3. Alokasi Waktu : 3 JP @45 menit (135 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan tindak lanjut paska tersusunnya RPKB. Secara garis besar, tindak lanjut mencakup sejumlah kegiatan yaitu: Sosialisasi, Latihan dan Uji Dokumen, Tabletop Exercise (TTX), Pembekalan dan Pemahaman, Penyusunan Skenario dan Pertanyaan, Menyusun RPKB, Menjalinkan kesepakatan dg Instansi vertikal dan Kerjasama Daerah, Tinjau Ulang Dok RPKB, Pembaharuan Dok RPKB. Bagian dari kegiatan tindak lanjut lainnya adalah pelaporan RPKB; baik RPKB tingkat Kab/Kota, maupun RPKB tingkat Provinsi.
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menentukan tindak lanjut setelah penyusunan RPKB
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, **peserta dapat:**
 1. Menentukan penguatan jejaring
 2. Menentukan peningkatan kapasitas
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Penguatan jejaring
 - a. Hubungan RPKB dengan Rencana kontigensi
 - b. Menyusun rencana kontigensi
 - c. Melakukan kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerjasama daerah
 - d. Pengamatan dinamika wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan. Sehingga menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya).
 - e. Tinjau Ulang dan pembaharuan RPKB
 - f. Pelaporan atas upaya tindak lanjut
 2. Peningkatan kapasitas
 - a. Sosialisasi
 - b. Latihan dan uji dokumen

Tabel L.9. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB

No	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi
		Materi Pokok	Sub Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menentukan penguatan jejaring	1. Penguatan jejaring	a. Hubungan RPKB dengan Rencana kontigensi b. Menyusun rencana kontigensi c. Melakukan kesepakatan dengan Instansi vertical dan melakukan Kerjasama Daerah d. Pengamatan dinamika wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan. Sehingga	1. Diskusi 2. Simulasi 3. Presentasi	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. Papan Tulis 5. Kertas & Papan Flipchart 6. Spidol berbagai warna 7. Panduan simulasi 8. Panduan Diskusi	Non Test Product: 1. Narasi tugas Jenis-jenis Tindak lanjut 2. Narasi Pelaporan Rancangan koordinasi dan kesepakatan dengan instansi vertical dan kerjasama daerah.	3	1. Pedoman RPKB 2. Permendagri 46/2008 tentang OTK BPBD 3. Perka BNPB No. 4 / 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB

No	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi
		Materi Pokok	Sub Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya). e. Tinjau ulang dan Pembaharuan RPKB f. Pelaporan atas upaya tindak lanjut					
2	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menentukan peningkatan kapasitas	2. Peningkatan Kapasitas	a. sosialisasi b. Latihan dan uji dokumen					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.9. MATA PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan RPKB
2. Mata Pelatihan : **Monitoring dan Evaluasi**
3. Alokasi Waktu : 2 JP @45 menit (90 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyiapkan dokumen pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan proses yang disepakati, mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan RPKB sedini mungkin, pencapaian standar minimum layanan dan peningkatan kinerja PB, penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan penyusunan RPKB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan monitoring evaluasi RPKB.
 - b. Indikator hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 1. Menjelaskan definisi monitoring dan evaluasi
 2. Menjelaskan ruang lingkup monitoring dan evaluasi di tingkat BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota
6. Materi Pokok dan sub materi pokok :
 1. Definisi monitoring dan evaluasi RPKB
 - a. Definisi monitoring dan evaluasi RPKB
 - b. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi RPKB
 - c. Kriteria kunci Monitoring Evaluasi RPKB
 2. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi
 - a. Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BNPB
 - b. Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BPBD Provinsi
 - c. Ruang lingkup Monitoring Evaluasi di Tingkat BPBD Kab/Kota

Tabel L.10. Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Monitoring dan Evaluasi

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Keterangan
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat Menjelaskan definisi monitoring dan evaluasi	1. Definisi monitoring dan evaluasi	a. Definisi monitoring dan evaluasi b. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi b. Kriteria kunci monitoring evaluasi RPKB	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Penugasan	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. Papan Tulis 5. Kertas & Papan Flipchart 6. Spidol berbagai warna 7. Panduan simulasi 8. Panduan Diskusi 9. Lembar Instrumen penilaian	Non test	2	1. Pedoman RPKB 2. Dokumen bahan evaluasi upaya penanggulangan bencana secara berkala 3. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minima 4. Dokumen RPB Kab. Bandung Barat Prov. Ja Bar 2018 - 2022
	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat Menjelaskan ruang lingkup monitoring dan evaluasi di tingkat BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota	2. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi	a. Ruang lingkup di tingkat BNPB b. Ruang lingkup di tingkat BPBD Provinsi b. Ruang lingkup di tingkat BPBD Kab/Kota					

Sumber: Hasil analisis

LAMPIRAN 2.10.

MATA PELATIHAN KETRAMPILAN MENYIMULASIKAN DOKUMEN RPKB

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Penyusunan dan Pemaparan Draft Dokumen RPKB
2. Mata Pelatihan : **Ketrampilan menyimulasikan dokumen RPKB Hasil Pelatihan**
3. Alokasi Waktu : 12 JP @45 menit (540 menit)
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan melakukan simulasi penyusunan draft dokumen RPKB dan kemampuan memaparkan draft dokumen RPKB. RPKB menurut Pedoman RPKB Edisi Tahun 2019 adalah kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menyimulasikan penyusunan dan memaparkan dokumen RPKB Hasil Pelatihan.
 - b. Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, **peserta dapat** menyimulasikan penyusunan dan memaparkan dokumen RPKB Hasil Pelatihan
6. Materi Pokok & Sub-Materi Pokok :
 1. Penugasan
 - a. Penjelasan penugasan
 - b. Sistematika Penulisan RPKB
 2. Simulasi Penyusunan dokumen latihan RPKB
 - a. Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB.
 - b. Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB.
 - c. Simulasi Penyusunan dokumen latihan RPKB.
 3. Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan
 - a. Penyiapan pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan
 - b. Pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan

Tabel L.11 Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelatihan Ketrampilan Menyimulasikan Dan Memaparkan Dokumen RPKB Hasil Pelatihan

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Keterangan
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat memahami penugasan mensimulasikan penyusunan dokumen RPKB	1. Penugasan	a. Penjelasan penugasan b. Sistematika Penulisan RPKB	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Praktik 4. Simulasi 5. Presentasi	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. Papan Tulis 5. Kertas & Papan Flipchart 6. Spidol berbagai warna 7. Panduan simulasi 8. Panduan Diskusi	<i>Non Test</i> <i>Product:</i> 1. Dokumen RPKB Hasil Pelatihan 2. Kemampuan pemaparan 3. Kualitas materi paparan	12	1. Pedoman RPKB. 2. dokumen RPKB hasil pelatihan dalam format word. 3. Draft dokumen RPKB hasil pelatihan dalam format pptx
2.	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat mensimulasikan penyusunan dokumen RPKB hasil pelatihan	2. Simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB	a. Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen RPKB. b. Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen RPKB. c. Simulasi Penyusunan dokumen RPKB.					
3.	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat	3. Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan	a. Penyiapan pemaparan dokumen RPKB Hasil Pelatihan.					

No.	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok		Metode Pembelajaran	Alat Bantu dan Media	Evaluasi	JPL	Referensi/Keterangan
		Materi Pokok	Sub-Materi Pokok					
	mensimulasikan dokumen RPKB hasil pelatihan		b. pemaparan dokumen RPKB Hasil pelatihan.					

Sumber: Hasil analisis

DAFTAR ISTILAH

AI	Artificial Intelligence adalah Kecerdasan Buatan, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien.
AR	Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh menggabungkan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata
CBSA	Cara belajar siswa aktif (CBSA) adalah salah satu cara belajar yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan untuk memecahkan suatu masalah agar tercapainya suatu masalah
CD	Compact disc read-only memory. Pengertian CD ROM (Compact Disc Read Only Memory) adalah compact Disk yang tidak bisa dipakai untuk menulis ulang (dihapus atau ditambah); digunakan dalam penyimpanan data komputer.
DRR	Disaster Risk Reduction Disaster risk reduction (DRR) adalah tujuan dan sasaran kebijakan, dan langkah-langkah strategis dan instrumental digunakan untuk mengantisipasi risiko bencana masa depan, mengurangi eksposur yang ada, bahaya, atau kerentanan, dan meningkatkan ketahanan
DSP	Dana Siap Pakai. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir
OPD	Organisasi Perangkat Daerah (lihat SKPD). Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
SDGs	Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030

SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework dapat menjadi panduan untuk dijadikan acuan terkait pengurangan risiko bencana. Namun, setiap implementasinya mesti disesuaikan secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan geografis dan kontekstual suatu wilayah
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM
IDRIP	Indonesian Disaster Resilience Initiatives Project. Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project, IDRIP). IDRIP akan membiayai investasi startegis dan prioritas pembangunan kapasitas untuk platform sistem peringatan dini multi-ancaman bahaya (Multi-Hazard Early Warning Systems, MHEWS) dan sistem manajemen darurat daerah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peristiwa bencana dimasa depan, khususnya bencana geofisika, dan mendukung kesiapsiagaan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat
IFRC	International Federation Red Cross. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) adalah suatu Badan yang mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) adalah suatu Badan yang mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan
JPL	Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah unit dan Jam Pelatihan (JP) tergantung kepada capaian kompetensi yang akan dicapai pada pelatihan tersebut. Karena untuk Pelatihan Berbasis Kompetensi tidak pernah dibatasi dengan durasi waktu. Untuk tiap-tiap program pelatihan akan berbeda pemberian durasi waktunya tergantung sampai mana kompetensi yang harus di capai untuk waktu berapa lama. Misal,

untuk pelatihan daring/prakerja, jumlah minimal yang disyaratkan adalah 6 Jam (360 Menit) yang setara dengan 8 Jam Pelajaran (1 JP = 45 menit).

NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
RENKON	Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi
RENOPS	Rencana Operasi. Rencana Operasional (operational planning) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu
VR	Virtual Reality. Realitas virtual atau kenyataan maya (bahasa Inggris: virtual reality, disingkat VR) adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau sebuah lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi

DAFTAR SINGKATAN

AI	Artificial Intelligence
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
AR	Augmented Reality
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BNPB	Badan Penanggulangan Bencana
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CBSA	Cara Belajar Siswa Aktif
CD	Compact disc read-only memory
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
DRR	Disaster Risk Reduction
DSP	Dana Siap Pakai
EMI	Emergency Management Institute
ERRA	Earthquake Reconstruction dan Rehabilitation Authority
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FEMA	Federal Emergency Management Agency

FFP	Fund For Peace
FGD	Focus Group Discussion
GPDRR	Global Platform for Disaster Risk Reduction
HFA	Hyogo Framework
HVCA	Hazard, Vulnerability And Capacity Analysis
IDRIP	Indonesian Disaster Resilience Initiatives Project
IFHV	Institute for International Law of Peace and Armed Conflict
IFRC	International Federation Red Cross
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
IPTEK	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
ISDR	Strategy for Disaster Reduction
JPL	Jumlah Jam Pelatihan
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
K/L	Kementerian/Lembaga
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KRB	Kajian Resiko Bencana
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPBI	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NGO	Non Governmental Organization
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OPD	Organisasi Perangkat Daerah (lihat SKPD)
PB	Penanggulangan Bencana
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PI	Programmed Instruction
PL	Praktik Lapang
PMI	Palang Merah Indonesia
POD	Pendidikan Orang Dewasa
PP	Peraturan Pemerintah
PPRR	Prevention-Preparedness-Response Recovery
PRA	Participatory Rural Appraisal
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
RAN-PRB	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RENAS PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

RENKON	Rencana Kontinjensi
RENOPS	Rencana Operasi
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTL	Rencana Tindak Lanjut
RW	Rukun Warga
SAR	Search and Rescue
SATPEL	Satuan Pelajar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SECI	Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, Dan Internalisasi
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah (disebut juga dengan nama OPD)
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SoD	Segregation of Duties

SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPN	Sistem Pendidikan Nasional
SRI	State Resilience Index
STTPL	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
TA	Tenaga ahli
UNDP	United Nations Development Programme
UNDRR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
USA	United State of America
UU	Undang-undang
UUD	Undang Undang Dasar
VR	Virtual Reality
WMO	World Meteorological Organization

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
8. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Pra-bencana dan Pasca Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB
 23. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
 24. Salinan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Training Of Trainer Pelatihan Reform Leader Academy.
 25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

B. Buku, Jurnal dan Laporan

1. Lasmana, Ujang Dede. 2022. Manajemen K3 Pada Pelatihan – Bagi Pelatih dan Tenaga Penyelenggara Pelatihan & Pendidikan Luar Sekolah (*offline, online, blended – indoor, outdoor*). Tangerang Selatan. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <http://bit.ly/K3Pelatihan>.
2. Modul pelatihan Training of trainer's (TOT) (2021), Pusdiklat aparatur Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
3. Modul Pelatihan Untuk Pelatih Fasilitator Patbm Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
4. Kurikulum Training Of Trainer (Tot) (2020), Diklat Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan
5. Modul Fasilitasi Pelatihan Dan Pendampingan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi (2022).
6. Kurikulum Dan Modul Pelatihan Untuk Pelatih Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Di Indonesia Kementerian Kesehatan RI (2014). Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.
7. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 1
8. Dokumen Pedoman RPKB (2019). BNPB
9. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat 2018 – 2022 Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (2022). Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
11. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 1
12. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 2
13. IFRC Project/programme monitoring and evaluation (M&E) guide (2011), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung
15. Kerangka Nasional Penanganan Darurat Bencana (KNPDB) Indonesia tahun 2018.

C. Sumber Internet

1. Lasmana, Ujang Dede. 2022. *Manajemen Risiko Pada Pelatihan Kebencanaan*. Tangerang Selatan. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <https://bit.ly/ManajemenRisikoPadaPelatihanKebencanaanReal>.
2. Sungkono, *Pemilihan Dan Penggunaan Media Dalam Proses Pembelajaran*. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131666729/penelitian/artikel-PEMILIHAN+MEDIA.doc>